

Pura *Eka Kahyangan* Arena Kontestasi Identitas: Konflik Dan Rekonsiliasi Emik Umat Hindu Di Waode Angkalo, Sulawesi Tenggara

Putu Yoga Margaretsa*, Ida Bagus Wika Krishna, Ni Luh Gede Hadriani
Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan, Singaraja, Indonesia
*yogamargaretsa11@gmail.com

Abstract

This study examines the internal conflict among Hindu transmigrants in Waode Angkalo Village, North Buton, regarding the interpretation of Pura Eka Kahyangan as a communal worship center. While some groups support the single-temple concept in line with PHDI policy, others advocate for the Tri Kahyangan system as an authentic representation of Balinese Hindu tradition. The research aims to analyze the dynamics of temple interpretation conflicts and explore emic-based resolutions emerging from community practices. A qualitative case study was employed, involving in-depth interviews, participant observation, and document analysis, with interactive data analysis through reduction, display, and conclusion drawing. Findings reveal that since 2007 the Hindu community has split into two factions supporters of Eka Kahyangan and Tri Kahyangan which by 2025 have grown to 32 and 97 households respectively. The conflict is driven by the persistence of Balinese traditions (sima), limited contextual understanding, functional dissatisfaction with the single temple, and political interests of local elites. Initially latent, the conflict evolved into a manifest struggle, turning the temple into a contested arena of identity, authority, and cultural legitimacy. Nevertheless, through the internalization of emic values such as ngayah, mutual cooperation, and deliberation, the temple continues to function as a multivocal symbol mediating tensions, sustaining social cohesion, and strengthening community resilience. This study highlights the significance of an emic approach in understanding intra-religious conflicts within transmigrant Hindu communities.

Keywords: Meaning Conflict; Eka Kahyangan; Emic; Community Resolution

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik internal umat Hindu transmigran di Desa Waode Angkalo, Buton Utara, yang mempersoalkan pemaknaan terhadap Pura *Eka Kahyangan* sebagai pusat ibadah bersama. Sebagian umat mendukung pura tunggal sesuai kebijakan PHDI, sementara kelompok lain menuntut *Tri Kahyangan* sebagai representasi otentik tradisi Hindu Bali. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika konflik pemaknaan pura dan bentuk resolusi berbasis emik yang lahir dari praktik komunitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, serta analisis data interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak 2007 umat Hindu terpecah menjadi dua kubu, yaitu pendukung *Eka Kahyangan* dan *Tri Kahyangan*, yang hingga 2025 berkembang menjadi 32 dan 97 kepala keluarga. Konflik dipicu oleh kebiasaan membawa tradisi Bali (*sima*), kurangnya pemahaman kontekstual, ketidakpuasan fungsional terhadap pura tunggal, serta kepentingan politik elite adat. Konflik yang awalnya laten berkembang menjadi manifes, menjadikan pura sebagai arena perebutan identitas, otoritas, dan legitimasi budaya. Namun, melalui internalisasi nilai emik seperti

ngayah, gotong royong, dan musyawarah, pura tetap berfungsi sebagai simbol multivokal yang menyalurkan ketegangan, menjaga kohesi sosial, serta memperkuat resiliensi komunitas. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan emik dalam memahami konflik intra-komunitas keagamaan di wilayah transmigrasi.

Kata Kunci: Konflik Pemaknaan; Eka Kahyangan; Emik; Resolusi Komunitas

Pendahuluan

Buton Utara, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan wilayah dengan dimensi multikultural yang ditandai oleh heterogenitas etnis dan agama. Desa Waode Angkalo, sebagai salah satu desa transmigrasi, dihuni oleh masyarakat Hindu yang sebagian besar berasal dari Bali, Jawa, dan penduduk asli Kulisusu. Program transmigrasi Orde Baru tahun 1992 menjadi titik awal hadirnya komunitas Hindu Bali di desa ini, yang kemudian mendirikan Pura *Eka Kahyangan* sebagai pusat ibadah bersama. Saat ini tercatat sekitar 150 kepala keluarga umat Hindu bermukim di desa tersebut.

Keberadaan Pura Eka Kahyangan memunculkan diskursus internal umat Hindu di Waode Angkalo. Konflik antara idealisme tradisi dan pragmatisme adaptasi ini lazim dalam diaspora Hindu Bali. Wirawan (2020), dalam kajiannya tentang komunitas Hindu di Lampung, menunjukkan bahwa tarik-menarik antara mempertahankan *Tri Kahyangan* dan mengadopsi pura tunggal kerap dipengaruhi keterbatasan sumber daya dan demografi umat. Di Waode Angkalo, sebagian pihak menerima pura tunggal sesuai keputusan PHDI (1982) sebagai adaptasi realistik, sementara yang lain menilai *Tri Kahyangan* lebih ideal karena merepresentasikan warisan Majapahit. Perdebatan ini pada hakikatnya adalah perebutan otoritas untuk mendefinisikan “keaslian” tradisi, sehingga pura tidak hanya menjadi sarana ritual, tetapi juga simbol identitas, otoritas budaya, dan legitimasi sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konflik intra-komunitas keagamaan kerap muncul ketika simbol religius dipertentangkan dalam konteks identitas. Misalnya, penelitian Reuter (2005) tentang komunitas Bali Aga menunjukkan bagaimana perbedaan tafsir tradisi dapat melahirkan kontestasi otoritas adat dan agama. Utama (2011) juga menekankan bahwa masyarakat Hindu *Bali Aga* melakukan adaptasi kultural dalam merespons regulasi negara, yang sering kali menimbulkan tarik menarik antara akomodasi dan resistensi. Penelitian Suyadnya (2018) tentang Desa Tenganan Pegringsingan menegaskan bahwa pura bukan hanya ruang sakral, melainkan juga arena politik identitas. Studi Horii (2017) bahkan menyoroti bagaimana agama berfungsi sebagai *traditional capital* yang bisa diperdebatkan untuk legitimasi sosial. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada Bali. Masih sangat sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika serupa di komunitas Hindu transmigran, terutama di luar Bali seperti di Sulawesi Tenggara.

Pertentangan di Waode Angkalo melahirkan konflik laten yang berkembang menjadi manifestasi nyata. Komunitas Hindu terbelah antara mempertahankan Pura Eka Kahyangan sebagai simbol autentisitas lokal atau membangun *Tri Kahyangan* sebagai ekspresi identitas Hindu-Bali. Polarisasi ini menciptakan *krisis reproduksi kultural*, di mana transmisi nilai dan memori kolektif generasi muda terhambat oleh konflik internal mengenai identitas yang dianggap sah. Kondisi ini menimbulkan disensus, melemahkan solidaritas, dan berisiko mengikis tradisi. Arthawiguna (2021) bahkan menegaskan bahwa generasi muda yang menyaksikan fragmentasi semacam ini rentan mengalami kebingungan identitas atau menjauh dari tradisi, sehingga mengancam kohesi sosial dan keberlangsungan identitas kultural komunitas diaspora.

Urgensi penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, secara akademis, penelitian ini memperluas kajian dinamika keagamaan umat Hindu di luar Bali, khususnya dalam

konteks transmigrasi yang jarang diteliti. Kedua, secara praktis, penelitian ini menawarkan kontribusi pada pengelolaan konflik berbasis perspektif emik, yang dapat memperkuat harmoni intra-komunitas maupun lintas umat beragama di daerah multikultural seperti Buton Utara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan teoretis bagi kajian agama dan identitas, serta manfaat praktis bagi rekonsiliasi sosial berbasis kearifan lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena fokus penelitian diarahkan pada dinamika konflik pemaknaan dan upaya resolusi emik terhadap Pura *Eka Kahyangan* di Desa Waode Angkalo. Studi kasus dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial-keagamaan yang kompleks dan kontekstual. Subjek penelitian meliputi tokoh adat, pemangku pura, pengurus PHDI setempat, serta warga Hindu dari kedua kelompok (pendukung konsep *Eka Kahyangan* dan *Tri Kahyangan*). Informan ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam isu penelitian, kemudian dikembangkan melalui teknik snowball. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dalam kegiatan keagamaan, dan studi dokumen (arsip desa, notulen rapat adat, dan catatan organisasi keagamaan). Peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan bantuan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan emik ditegaskan sebagai kerangka utama untuk memahami perspektif umat Hindu setempat, sekaligus dipadukan dengan analisis peneliti guna menjelaskan dinamika konflik dan strategi rekonsiliasi. Dengan demikian, metode ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menegaskan hubungan antara simbol religius, identitas, dan mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal.

Hasil dan Pembahasan

1. Konflik Pemaknaan *Pura Eka Kahyangan*

Data lapangan menunjukkan bahwa konflik yang awalnya laten kemudian berkembang menjadi manifes. Pada 2007, terjadi perpecahan: 18 KK bertahan pada konsep *Eka Kahyangan*, sedangkan 87 KK membangun pura dengan sistem *Tri Kahyangan*. Hingga 2025, jumlah ini berkembang menjadi 32 KK dan 97 KK. Data kuantitatif mengenai perkembangan jumlah kepala keluarga yang terpecah ke dalam faksi *Eka Kahyangan* dan *Tri Kahyangan* memberikan bukti empiris yang kuat atas realitas konflik pemaknaan. Angka-angka tersebut tidak sekadar mencatat perbedaan pilihan ritual, melainkan menegaskan terjadinya fragmentasi sosial yang berwujud dalam pembagian fisik komunitas Hindu menjadi dua kubu yang berlawanan. Evolusi jumlah pengikut dari waktu ke waktu memperlihatkan bahwa konflik ini bukan fenomena statis, melainkan proses dinamis yang terus bergerak, menandakan pergeseran kekuatan relatif dan legitimasi di antara kelompok. Secara kritis, data ini juga mengindikasikan adanya proses bipolarisasi yang berpotensi melemahkan solidaritas internal, merusak memori kolektif, serta menggerus kohesi komunitas. Dengan demikian, tabel perkembangan jumlah penganut bukan hanya alat deskriptif, tetapi juga representasi visual dari ketegangan struktural dan simbolik yang tengah dipertaruhkan dalam komunitas Hindu di Desa Waode Angkalo.

Tabel 1. Jumlah KK yang Pro dan Kontra dengan *Eka Kahyangan* dan *Tri Kahyangan*

| No | Tahun | Jumlah KK <i>Pura Eka Kahyangan</i> | Jumlah KK <i>Pura Tri Kahyangan</i> |
|----|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | 2007 (Awal Perpecahan) | 18 | 87 |
| 2. | 2025 (Saat Ini) | 32 | 97 |

Sumber: Peneliti (Mei 2025)

Sejak program transmigrasi Orde Baru (1992), umat Hindu Bali yang direlokasi ke Sulawesi Tenggara diarahkan untuk menggunakan pura tunggal sesuai keputusan PHDI Pusat tahun 1982. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban umat secara ekonomi dan administratif, namun dalam perspektif teori konflik (Dahrendorf, 1959) justru menunjukkan relasi kuasa yang timpang. Otoritas eksternal memaksakan model tunggal, sementara umat membawa habitus dan modal simbolik *Tri Kahyangan* yang sudah mendarah daging.

Bagi umat Bali, *Tri Kahyangan* bukan hanya tata ritual, tetapi juga modal simbolik yang menjadi penopang identitas kolektif (Bourdieu, 1991). Ketika struktur eksternal memaksakan model tunggal, terjadi benturan antara otoritas formal dan otoritas kultural. Dalam perspektif Turner (1967), pura menjadi simbol liminal yang diperebutkan maknanya, sehingga berfungsi sebagai arena konflik identitas. Situasi ini selaras dengan temuan Reuter (2005) tentang tafsir tradisi di Bali Aga sebagai sumber kontestasi otoritas adat, dan penelitian Utama (2011) yang menegaskan bahwa regulasi negara sering memunculkan resistensi simbolik.

Konflik juga diperkuat oleh beberapa faktor internal. Pertama, kebiasaan membawa *sima* dari Bali menjadikan penerimaan terhadap pura tunggal semakin sulit. Kedua, kurangnya pemahaman kontekstual dan minimnya pembinaan keagamaan pada awal transmigrasi memperlebar jurang tafsir. Ketiga, ketidakpuasan fungsional muncul karena pura tunggal dianggap tidak sepenuhnya mewedahi fungsi religius maupun budaya. Keempat, kepentingan politik di tingkat elite adat turut memperkeruh perbedaan, sehingga perbedaan pandangan berubah menjadi perpecahan struktural.

Menariknya, meskipun konflik internal tajam, harmoni eksternal dengan warga Jawa dan Kulisusu tetap terjaga. Gotong royong, ngayah, dan partisipasi sosial menjadi mekanisme yang memungkinkan kohesi lintas komunitas tetap terpelihara. Hal ini sesuai dengan temuan Horii (2017) yang menyebut agama dapat berfungsi sebagai *traditional capital* yang dinegosiasikan secara internal, tetapi tetap menopang kohesi sosial pada level antar-komunitas.

Dengan demikian, konflik pemaknaan Pura Eka Kahyangan dapat dipahami sebagai pertarungan struktural antara homogenisasi kebijakan agama dan pluralitas tradisi Hindu Bali. Kasus ini membuktikan tesis Dahrendorf bahwa konflik sosial bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis dari distribusi otoritas yang timpang. Pura pada akhirnya tidak hanya menjadi pusat spiritual, melainkan arena perebutan otoritas dan identitas yang menegaskan kompleksitas dinamika umat Hindu di Waode Angkalo.

2. Pura Eka Kahyangan sebagai Arena Kontestasi Internal Umat Hindu

a. Polarisasi Umat antara Pengusung *Pura Eka Kahyangan* dan *Tri Kahyangan*

Polarisasi umat Hindu di Desa Waode Angkalo memperlihatkan bagaimana perbedaan tafsir atas Pura *Eka Kahyangan* berkembang menjadi pertarungan simbolik yang kompleks. Komunitas terbelah ke dalam dua kubu yang sama-sama merasa memiliki legitimasi: satu mempertahankan konsep *Eka Kahyangan* sebagai bentuk adaptasi autentik di tanah perantauan, dan yang lain mendorong *Tri Kahyangan* sebagai warisan ideal Hindu-Bali yang lebih mapan. Polarisasi ini menjadikan pura bukan sekadar sarana

ritual, melainkan titik sentral perebutan makna dan otoritas budaya. Temuan ini sejalan dengan kajian Picard (2004) tentang agama Hindu di Bali, di mana pura kerap berfungsi sebagai locus kontestasi antara otentisitas tradisi dan tuntutan adaptasi sosial, terutama dalam konteks diaspora.

Dalam perspektif simbolisme Victor Turner (1967), konflik ini dapat dibaca melalui konsep multivokalitas simbol, di mana sebuah simbol religius memuat lapisan makna yang beragam dan dapat ditafsirkan berbeda oleh kelompok sosial sesuai kepentingan, pengalaman, dan habitus mereka. Bagi penganut *Eka Kahyangan*, pura tunggal dipandang sebagai traditional capital yang menegaskan identitas diaspora Hindu-Bali sebuah bentuk ke-Hinduan yang relevan dengan realitas baru. Sementara itu, bagi penganut *Tri Kahyangan*, pura tunggal dianggap tidak cukup merepresentasikan trinitas dewa dan warisan Majapahit, sehingga pembangunan *Tri Kahyangan* dipandang sebagai cara untuk menjaga otentisitas dan kesinambungan tradisi. Fenomena serupa juga tercatat dalam studi Geertz (1973), yang menunjukkan bahwa simbol-simbol religius di masyarakat Asia Tenggara tidak hanya menjadi alat ritual, tetapi juga arena negosiasi sosial-politik yang menentukan posisi dan legitimasi kelompok.

Dengan demikian, Pura Eka Kahyangan menjadi simbol multivokal yang diperebutkan: bagi satu pihak, ia adalah lambang adaptasi dan keunikan identitas di tanah rantau, sementara bagi pihak lain, ia adalah representasi warisan kultural yang harus dipertahankan di mana pun komunitas berada. Pertarungan ini tidak semata menyangkut pilihan arsitektur atau tata ruang pura, melainkan menyangkut klaim otoritas atas siapa yang berhak mendefinisikan identitas Hindu-Bali di ruang transmigrasi. Konteks ini sejalan dengan Reuter (2002) yang mengamati bahwa dalam masyarakat Bali Aga, pura kerap menjadi titik konsentrasi otoritas simbolik yang diperebutkan antara kelompok elit dan komunitas akar rumput.

Polarisasi umat membawa dampak serius terhadap kehidupan sosial dan budaya umat Hindu di Waode Angkalo. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian Atmaja (2021) di komunitas Hindu lainnya, yang mengungkap bahwa perbedaan pandangan keagamaan berpotensi memicu disintegrasi sosial, melemahkan solidaritas, dan mengancam kelangsungan praktik budaya kolektif. Di Waode Angkalo, dampak tersebut tampak nyata. Pertama, kohesi internal umat yang sebelumnya kuat menjadi rentan terpecah, memunculkan rasa saling curiga di antara anggota komunitas. Kedua, komunikasi intra-komunitas tidak lagi sepenuhnya harmonis karena masing-masing kelompok mempertahankan pandangan yang dianggap paling sah, sehingga identitas budaya dan keagamaan yang dulunya terbangun atas dasar kebersamaan kini mulai terfragmentasi. Ketiga, keretakan semakin tampak pada tingkat elite adat dan tokoh masyarakat, di mana persaingan personal dan perbedaan kepentingan kelembagaan membuat hubungan antar-pemimpin menjadi tegang. Keempat, konflik mulai berimplikasi pada pelaksanaan ritual bersama, yang semakin sulit diwujudkan karena fragmentasi kepemimpinan adat. Situasi ini memperkuat analisis Atmaja (2021) bahwa ketika konflik internal tidak dikelola dengan baik, yang terancam bukan hanya hubungan sosial, tetapi juga integritas dari sistem religi dan budaya komunitas tersebut.

Situasi ini menunjukkan bahwa konflik pemaknaan pura tidak hanya berhenti pada tataran ideologis, tetapi telah mengancam keberlangsungan praktik keagamaan kolektif yang seharusnya menjadi perekat utama solidaritas komunitas Hindu di Waode Angkalo. Temuan serupa dilaporkan oleh Putra & Darmayasa (2022) dalam penelitian mereka di komunitas Hindu urban, di mana mereka menyimpulkan bahwa ketika fungsi pura sebagai "ruang konsensus" melemah, yang terjadi adalah disrupsi terhadap ritme dan partisipasi dalam ritual-ritual komunal. Hal ini sejalan dengan penelitian Lansing (2007) yang menegaskan bahwa fragmentasi internal dalam komunitas Hindu sering kali

berdampak langsung pada kohesi sosial dan keberlangsungan ritual, karena pura merupakan pusat integrasi sosial dan religius. Lebih lanjut, Putra & Darmayasa (2022) mengingatkan bahwa melemahnya partisipasi dalam ritual kolektif merupakan indikator awal dari melemahnya ikatan sosial (*social glue*) yang selama ini dijalin melalui aktivitas keagamaan bersama. Dengan demikian, konflik di Waode Angkalo bukan sekadar persoalan perbedaan tafsir, melainkan sebuah tantangan eksistensial terhadap kohesi komunitas itu sendiri

b. Dinamika Ketegangan Otoritas dan Perebutan Makna

Ralf Dahrendorf (1959) menegaskan bahwa konflik sosial merupakan konsekuensi logis dari struktur masyarakat yang hierarkis, di mana distribusi otoritas yang timpang selalu memunculkan ketegangan antara kelompok dominan dan subordinat. Dinamika tersebut tercermin jelas di Desa Waode Angkalo melalui konflik pemaknaan Pura *Eka Kahyangan*. Di satu sisi, terdapat kelompok yang mempertahankan Pura Tunggal sebagai bentuk adaptasi autentik terhadap realitas transmigrasi, sedangkan di sisi lain, kelompok yang mendukung *Tri Kahyangan* menilai konsep ini lebih ideal karena berakar pada tradisi Hindu-Bali Majapahit. Perbedaan ini menjadikan pura tidak hanya sebagai sarana persembahyangan, tetapi juga simbol perebutan legitimasi dan otoritas budaya. Dengan kerangka Dahrendorf, konflik ini dapat dibaca bukan semata-mata sebagai perbedaan teologis, melainkan sebagai arena di mana kelompok berusaha menegakkan dominasi kultural dan mendefinisikan ulang identitas komunitas sesuai kepentingannya (Amitasari et al., 2021).

Kelompok pro-*Tri Kahyangan* yang membawa tradisi mapan dari Bali memiliki posisi lebih dominan. Superioritas demografis ini digunakan untuk menegaskan otoritas simbolik, sehingga Pura *Tri Kahyangan* dipandang sebagai representasi sah dari kosmologi Hindu-Bali. Sebaliknya, kelompok *Eka Kahyangan* menolak dominasi tersebut dengan berpegang pada klaim autentisitas lokal, menjadikan pura sebagai arena resistensi terhadap dedomestifikasi yang mengancam tradisi mereka. Dalam perspektif Turner (1967), perbedaan tafsir ini mencerminkan multivokalitas simbol, di mana satu simbol religius memuat berlapis-lapis makna yang diperebutkan sebagai sumber otoritas. Dengan demikian, Pura *Eka Kahyangan* menjadi titik sentral kontestasi, bukan hanya antara dua cara beribadah, tetapi juga antara dua klaim kebenaran atas makna identitas Hindu di tanah rantau (Hubeis et al., 1991).

Perbedaan orientasi konsep pura turut membentuk divergensi ritual yang memperkuat polarisasi. Bagi penganut *Tri Kahyangan*, pemujaan terhadap tiga dewa utama—Brahma, Wisnu, dan Siwa—merefleksikan kosmologi yang terstruktur dan elaboratif, sedangkan penganut *Eka Kahyangan* memusatkan pemujaan pada Ciwa, Sadaciwa, dan Paramasiwa dalam satu pura, melambangkan pendekatan sinkretis dan adaptif. Perbedaan ini bukan sekadar variasi teknis, melainkan ekspresi perebutan makna kosmologis yang mendasari otoritas religius. Dalam kerangka Bourdieu (1991), ritual dan praktik ini dapat dibaca sebagai bentuk *traditional capital* yang dimobilisasi untuk mempertahankan atau memperluas dominasi kultural. Dengan demikian, konflik internal ini merepresentasikan perebutan makna yang berimplikasi langsung pada distribusi otoritas dalam komunitas Hindu transmigran (Hardiana & Asmarita, 2021).

Perpecahan umat setelah upacara pedagingan tahun 2007 semakin mempertegas bahwa konflik ini telah berkembang dari sekadar perbedaan tafsir menjadi pertarungan kekuasaan. Alih-alih menyatukan, upacara tersebut justru memunculkan dualisme otoritas antara kelompok yang mengklaim superioritas tradisi Bali dan kelompok yang mempertahankan autentisitas lokal. Faktor kebiasaan membawa *sima* dari Bali, kurangnya pemahaman kontekstual, serta minimnya penyuluhan awal memperdalam jurang perbedaan, sementara kepentingan politik di kalangan tokoh adat menambah

lapisan persaingan. Ketegangan ini menunjukkan bahwa konflik pemaknaan Pura *Eka Kahyangan* pada hakikatnya adalah perebutan otoritas dan makna—siapa yang berhak mendefinisikan bentuk ke-Hinduan, siapa yang berhak mengklaim warisan budaya, dan siapa yang berhak menata legitimasi sosial di dalam komunitas. Polarisasi yang terjadi menegaskan bahwa pura telah bergeser dari pusat spiritual menjadi medan kontestasi otoritas kultural, di mana setiap faksi berupaya mengendalikan arah identitas Hindu di Desa Waode Angkalo (Utari, Noak & Pramana, 2024).

3. Internalisasi Nilai Emik dalam Mengelola Konflik di Pura *Eka Kahyangan*

Dalam perspektif emik, Pura *Eka Kahyangan* dipahami bukan sekadar tempat persembahyangan, melainkan arena sublimasi konflik dan pemelihara solidaritas. Bagi masyarakat Hindu di Waode Angkalo, pura berfungsi sebagai pusat ritual dan spiritualitas yang menyediakan ruang kolektif untuk doa, meditasi, dan relasi dengan Tuhan. Fungsi religius ini sekaligus menjadi mekanisme sosial yang menekan potensi disintegrasi, sejalan dengan Victor Turner (1969) yang menegaskan ritual sebagai *social drama* untuk mengelola ketegangan. Karena itu, Pura *Eka Kahyangan* tampil sebagai simbol identitas yang meneguhkan tradisi Bali di perantauan sekaligus legitimasi kultural bagi kebersamaan komunitas di tengah tafsir yang beragam, serupa dengan temuan pada Pura Lingsar di Lombok yang memperlihatkan kompleksitas makna emik dalam festival lintas agama (Maćkowiak, 2021).

Lebih jauh, pura diposisikan sebagai wadah komunitas, tempat berlangsungnya pertemuan, diskusi, dan kegiatan sosial-budaya. Posisi ini menjadikannya pusat pelestarian ritual Hindu sekaligus arena negosiasi, sesuai teori konflik Ralf Dahrendorf (1959) yang menyatakan ketegangan sosial dapat dikelola bila ada institusi yang mampu menyalurkan kepentingan. Dalam konteks ini, pura tidak hanya menjaga kesinambungan tradisi, tetapi juga menjadi ruang simbolik yang memungkinkan kompromi sosial antar kelompok tercapai tanpa memutus kohesi. Fungsi semacam ini juga ditemukan dalam studi diaspora Hindu di Trinidad, di mana pura berfungsi sebagai simbol identitas sekaligus arena perlawanan kultural dalam masyarakat majemuk (Prorok, 1987).

Dari sisi semiotik, Pura *Eka Kahyangan* dimaknai sebagai simpul kosmik yang merepresentasikan hubungan manusia dengan jagat raya. Arsitektur dan simboliknya mencerminkan kosmologi Hindu tentang keseimbangan alam semesta. Clifford Geertz (1973) menekankan simbol religius sebagai *model of reality* dan *model for reality*; pura, dengan demikian, bukan hanya cerminan kosmos, tetapi juga pedoman etis bagi umat untuk hidup harmonis. Aktivitas ritual di pura memperkuat kesadaran akan warisan budaya sekaligus memperdalam solidaritas sosial yang lebih luas, sejalan dengan studi Pura Munnesvaram di Sri Lanka yang menunjukkan peran pura sebagai pusat kohesi religius meski berada di tengah konflik etnis (Bastin, 2002).

Lebih penting lagi, internalisasi nilai dari pura menunjukkan bahwa penyelesaian konflik horizontal dicapai melalui rekonstruksi makna simbolik. John Paul Lederach (1997) menekankan bahwa rekonsiliasi berbasis identitas budaya dan religius lebih efektif dibanding pendekatan struktural, karena menyentuh dimensi emosional dan spiritual. Praktiknya, meski perbedaan pandangan tetap ada, umat Hindu di Waode Angkalo menjaga kerukunan melalui ngayah, gotong royong, dan kebersamaan dalam suka duka. Hal ini membuktikan bahwa konflik pemaknaan tidak otomatis mengikis kohesi sosial, sejauh nilai simbolik pura dapat diformulasikan sebagai basis harmoni, sebagaimana terlihat pula dalam konteks diaspora Hindu di Amerika di mana mandir berperan mengatasi isu sosial komunitas dan memperkuat solidaritas internal (Reddy, 2023).

Dimensi emik dalam konteks ini menegaskan bahwa tradisi, budaya, dan agama bukanlah entitas yang statis. Ketiga unsur tersebut saling memengaruhi dan membentuk pandangan umat secara dinamis, sebagaimana terjadi pada tradisi dari Bali yang

berinteraksi dengan pengalaman transmigrasi dan kondisi baru di Waode Angkalo. Geertz (1973) menyebutnya sebagai *cultural system*, suatu kerangka interpretatif yang hidup. Dalam kerangka inilah, Pura Eka Kahyangan menjalankan fungsinya. Sejalan dengan penelitian Sugiarta (2019), pura dalam masyarakat Bali tidak hanya berperan sebagai pusat spiritual (*kahyangan*), tetapi juga sebagai simbol identitas kolektif yang kuat. Lebih dari itu, pura sering kali berfungsi sebagai 'arena' tempat berbagai kepentingan dan penafsiran keagamaan yang berbeda antar faksi dalam komunitas—berdialog dan bernegosiasi.

Dengan demikian, Pura *Eka Kahyangan* di Waode Angkalo merepresentasikan sistem budaya yang dinamis: pusat spiritual, simbol identitas, sekaligus arena dialog lintas faksi. Perbedaan tafsir justru memperkuat fungsi pura sebagai *locus* mediasi. Suardana (2022) menunjukkan bahwa tempat suci kerap berfungsi sebagai ruang netral yang memaksa pihak-pihak berselisih bernegosiasi karena adanya kepentingan kolektif yang lebih besar, yakni keselamatan ritual dan kosmis. Dalam konteks ini, PHDI, tokoh adat, pemangku, dan pemimpin agama bertindak sebagai fasilitator rekonsiliasi, sejalan dengan Lederach (1997) tentang pentingnya *insider mediator*. Legitimasi normatif dari teks Hindu seperti *Bhisma Parwa* dan *Purana*, ketika diaktifkan oleh pemimpin yang diakui, menjadi instrumen efektif untuk meredakan ketegangan dan mengarahkan konflik ke arah transformatif (Suardana, 2022). Dengan demikian, pura bukan sekadar tempat ibadah, melainkan pranata sosial yang menjaga keseimbangan antar faksi, sebagaimana kasus Skanda Vale di Inggris yang memperlihatkan pura sebagai arena perdebatan identitas Hindu di ruang publik (Warrier, 2009).

Lebih jauh, Pura *Eka Kahyangan* berfungsi sebagai sekolah sosial yang menanamkan nilai harmoni melalui dialog lintas kelompok, kesediaan mendengar, dan kesadaran kolektif. Fungsi edukatif ini sejalan dengan temuan Darmayasa (2023) yang melihat tempat ibadah dalam masyarakat multikultural sebagai laboratorium sosial untuk membangun ketahanan budaya melalui dialog dan negosiasi makna. Meski fragmentasi ritual tetap ada, generasi muda berperan penting sebagai agen transformasi yang menjembatani warisan tradisi dengan kebutuhan kontemporer, sehingga lahir bentuk solidaritas baru. Secara teoretis, hal ini mengonfirmasi pandangan Turner (1969) bahwa pura sebagai simbol multivokal tidak hanya menampung beragam makna, tetapi juga menyediakan ruang untuk mengatasi polarisasi dan memperkuat solidaritas *in-group*.

Pada akhirnya, Pura *Eka Kahyangan* juga membentuk etos belajar dan kesediaan masyarakat untuk mengasah diri. Nilai ini tumbuh dari dimensi semiotik pura yang menanamkan kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Praktik ritual melatih umat untuk berpikir komprehensif, menyaring opini, dan mengutamakan keharmonisan. Sejalan dengan Geertz (1973), simbol agama menjadi pedoman interpretatif bagi masyarakat. Internalisasi nilai belajar ini menumbuhkan karakter humanis dan reflektif, membentuk *self-regulation* serta transformasi tindakan nyata yang memberi kontribusi positif bagi lingkungan sosial.

Dengan demikian, internalisasi nilai etik melalui Pura *Eka Kahyangan* menegaskan bahwa manajemen konflik tidak hanya mengandalkan mediasi formal atau kompromi struktural, tetapi juga pendidikan karakter kolektif. Fungsi transformatif pura melengkapi perannya sebagai *locus* dialog dan simbol multivokal, yang memungkinkan masyarakat Hindu di Waode Angkalo mereduksi konflik, memperkuat identitas, serta membangun resiliensi sosial-budaya di tengah dinamika komunitas transmigran.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa konflik pemaknaan Pura *Eka Kahyangan* di Desa Waode Angkalo berawal dari perpecahan umat Hindu sejak 2007, ketika sebagian keluarga mempertahankan pura tunggal sebagai bentuk adaptasi diaspora, sementara

kelompok lain mengusung Tri *Kahyangan* sebagai warisan tradisi Hindu Bali. Perbedaan ini dipicu oleh kebijakan transmigrasi dan keputusan keagamaan yang mendorong homogenisasi, kebiasaan membawa tradisi dari daerah asal, keterbatasan pembinaan awal, serta dinamika kepentingan lokal. Perkembangan jumlah kepala keluarga yang terbelah dalam dua kubu memperlihatkan bahwa konflik berlangsung dinamis dan berimplikasi pada melemahnya kohesi internal umat, meskipun hubungan sosial dengan komunitas non-Bali tetap harmonis. Pada saat yang sama, Pura *Eka Kahyangan* tidak hanya menjadi sumber pertentangan, tetapi juga ruang mediasi melalui praktik *ngayah*, gotong royong, serta peran tokoh adat dan pemimpin agama dalam memfasilitasi rekonsiliasi. Dengan demikian, keberadaan pura merepresentasikan dinamika ganda: sebagai pusat spiritual dan simbol identitas yang memperlihatkan fragmentasi, sekaligus pranata sosial yang memungkinkan komunitas menjaga solidaritas dan melestarikan identitas budaya di tengah realitas multikultural.

Daftar Pustaka

- Amitasari, N., Prawitasari, M., & Akmal, H. (2021). Potret Kehidupan Masyarakat Transmigran Bali di Desa Sumber Makmur Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 1-7.
- Arthawiguna, I. M. (2021). Dilema Identitas dan Krisis Reproduksi Kultural pada Komunitas Hindu Diaspora di Sulawesi Tengah. *Jurnal Kajian Bali*, 11(2), 345–364.
- Atmaja, N. B. (2021). Konflik Internal Umat Hindu: Akar Permasalahan dan Dampaknya Terhadap Kohesi Sosial dan Budaya di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 11(1), 155–178.
- Bastin, R. (2002). The Domain of Constant Excess: Plural Worship at the Munnesvaram Temples in Sri Lanka. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 8(2), 299–320.
- Bernardo, G. A. D., Vezzali, L., Stathi, S., Keown, S. M., Cocco, V. M., Saguy, T., & Dixon, J. (2021). Fostering Social Change Among Advantaged and Disadvantaged Group Members: Integrating Intergroup Contact and Social Identity Perspectives on Collective Action. *Group Processes & Intergroup Relations*, 24(1), 26–47.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity.
- Dahrendorf, R. (1958). Toward a Theory of Social Conflict. *Journal of Conflict Resolution*, 2(2), 170–183.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Dahrendorf, R. (2019). Class and Class Conflict in Industrial Society. In D. B. Grusky & S. Szelenyi (Eds.), *Social Stratification, Class, Race, and Gender in Sociological Perspective* (2nd ed., pp. 105–111). New York, NY: Routledge.
- Dahrendorf, R. (2022). *Essays in the Theory of Society*. New York, NY: Routledge.
- Darmayasa, I. B. (2023). Ruang Suci Sebagai Laboratorium Sosial: Ketahanan Budaya dan Reproduksi Nilai dalam Komunitas Multikultural. *Jurnal Kajian Budaya*, 15(1), 78–95.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York, NY: Basic Books.
- Geertz, C. (2005). *Clifford Geertz by His Colleagues*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Grunig, J. E. (2023). Public Relations, Social Inclusion, and Social Exclusion. *Journalism & Communication Monographs*, 25(2), 90–108.

- Hardiana, S., & Asmarita, A. (2021). Perubahan Adat Perkawinan Masyarakat Transmigran Bali di Konawe Selatan. *Etnoreflika: Jurnal Antropologi*.
- Horii, M. (2017). Contextualizing “Religion” of Young Karl Marx: A Preliminary Analysis. *Critical Research on Religion*, 5(2), 170–187.
- Hubeis, A. V. S., et al. (1991). *Konflik Sosial pada Masyarakat Transmigran*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Lansing, J. S. (2007). *Perfect Order: Recognizing Complexity in Bali*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press.
- Maćkowiak, A. (2021). Contesting Rituals: The Case of Pura Lingsar in Lombok. *Indonesia and the Malay World*, 49(143), 1–20.
- Mahalakshmi, R. (2014). Book Review: Wendy Doniger, On Hinduism. *Studies in History*, 30(2), 223–228.
- Picard, M. (2004). *Bali: Cultural Tourism and Touristic Culture*. Singapore: National University of Singapore Press.
- Prorok, C. V. (1987). Hindu Temples in Trinidad: The Negotiation of Ethnic Identity in a Plural Society. *Caribbean Quarterly*, 33(2/3), 59–73.
- Putra, I. D. G. A., & Darmayasa, I. B. (2022). Pura dalam Pusaran Konflik Simbolik: Memudarnya Ruang Konsensus dan Dampaknya Terhadap Ritual Komunal di Komunitas Hindu Urban. *Jurnal Kajian Agama dan Masyarakat*, 18(1), 45–62.
- Reddy, S. (2023). Hindu Temples in America: Diaspora, Community, and Identity. *Journal of Hindu Studies*, 16(1), 45–62.
- Reuter, T. A. (2002). *Custodians of the Sacred Mountains: Culture and Society in the Highlands of Bali*. Honolulu: University of Hawai‘i Press.
- Suardana, I. N. (2022). Pura Sebagai Ruang Negosiasi: Konflik Internal Umat Hindu dan Mekanisme Resolusi Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 112–128.
- Sugiarta, I. G. B. (2019). Pura Sebagai Arena Negosiasi Identitas dan Kuasa Simbolik dalam Masyarakat Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 179–190.
- Suyadnya, I. W. (2019). Interaksi Kekuasaan Adat dan Negara dalam Perspektif Masyarakat Bali Kuno Tenganan Pegringsingan. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 4(1), 1–15.
- Turner, V. (1967). *The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Turner, V., Abrahams, R., & Harris, A. (2017). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. New York, NY: Routledge.
- Utama, I. W. B. (2011). Adaptasi Budaya Masyarakat Bali Aga dalam Merespon Regulasi Negara dalam Bidang Agama (Disertasi Doktor, Universitas Udayana). Denpasar: Universitas Udayana Repository.
- Utari, N. P., Noak, I. K., & Pramana, I. M. (2024). Konflik Tanah Antara Desa Adat Klecung dan Puri Kerambitan di Tabanan. *Triwikrama: Jurnal Ilmiah Kajian Budaya*.
- Warrier, M. (2009). *Hindu Selves in a Modern World: Guru Faith in the Mata Amritanandamayi Mission*. New York, NY: Routledge.
- Wirawan, I. G. A. (2020). Konstruksi Otoritas dan Authenticity: Perebutan Makna Tri Kahyangan vs Pura Tunggal pada Komunitas Hindu Diaspora di Lampung. *Jurnal Kajian Agama dan Budaya*, 16(2), 112–129.